

Perumusan Indikator Kemiskinan dan Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagedangan Ilir, Kronjo, Tangerang

Achmad Reza Widjaja

Bakrie University

Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12920

*Corresponding author: awidjaja@bakrie.ac.id

Diterima : 25 Juli 2019

Disetujui : 25 September 2019

Abstract: Apparatus often do not have standard and specific indicators for determining pre-prosperous families. It will, as a matter of fact, create an impact on targeting the beneficiaries of a welfare program, to the extent that it will cause the community welfare program less effective. This research aims to formulate indicators of poverty and measurement of community welfare in Pagedangan Ilir Village. The formulation of poverty indicators and measurements of welfare is a review from various poverty indicators or standard welfare measures, which are previously produced by government and other research institutions. In this research, a study by Center for International Forestry Research (CIFOR) becomes the basic benchmark to measure the community welfare in Pagedangan Ilir Village, by which the results obtained in the form of welfare based on indicator index, dimension index and aggregate index. The results show that in aggregate, there are no families in Pagedangan Ilir Village classified as "Very Poor", 32% of families are classified as "Poor", while 67% and 1% of them are classified as "Prosperous" and "Very Prosperous", respectively. In terms of classification of welfare levels according to the average aggregate welfare index, the family in Pagedangan Ilir Village is categorized as "Prosperous" with an index of 55.88.

Key words: Formulation of indicators, measurement of welfare, poverty.

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan kesejahteraan adalah dua hal yang sangat berkaitan dan sulit untuk dipisahkan. Berbagai konsep telah dirilis berkaitan dengan pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan dan kesejahteraan. Pendekatan tentang kesejahteraan yang pertama mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan lebih sejahtera jika ia memiliki kuasa yang lebih besar atas suatu sumberdaya. Yang menjadi fokus di sini adalah ukuran sebuah rumah tangga atau seseorang memiliki sumber daya yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Di lain pihak, kemiskinan diukur dengan membandingkan pendapatan seseorang dengan ambang batas kemiskinan yang ditetapkan oleh suatu ukuran, dimana orang tersebut dianggap miskin jika pendapatannya di bawah ambang batas tersebut. Sebagai contoh, Bank Dunia menetapkan ambang batas kemiskinan dengan pendapatan kurang dari USD 1 per hari sebagai kategori "sangat miskin", dan pendapatan kurang dari USD 2 per hari sebagai kategori "miskin". Ambang batas kemiskinan di Indonesia ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan

ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Pendekatan kedua untuk kesejahteraan dan kemiskinan adalah dengan melayangkan survei untuk mendapatkan informasi apakah individu atau rumah tangga mampu mengkonsumsi jenis barang tertentu, bagaimana tempat tinggalnya, tingkat kesehatannya serta tingkat pendidikannya. Dalam pandangan ini analisis kesejahteraan lebih bersifat pengukuran tradisional atau berada di luar ukuran kemiskinan secara moneter. Pendekatan lainnya mengatakan bahwa kesejahteraan berasal dari kemampuan untuk berfungsi di dalam masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan itu ada ketika orang tidak memiliki kemampuan hidup yang layak, tidak memiliki penghasilan, memiliki pendidikan yang tidak memadai, atau memiliki kesehatan yang buruk, rasa tidak aman, rendahnya kepercayaan diri, rasa ketidakberdayaan, yang semua itu mengakibatkan seseorang tidak memiliki kebebasan dalam menuntut hak-haknya. Pandangan terakhir ini menilai bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang tidak memiliki solusi sederhana.

Di seluruh dunia, kesejahteraan dan kemiskinan masih menjadi domain penting dalam proses pembangunan

sebuah negara. Sepenuhnya diyakini oleh para ahli ekonomi pembangunan bahwa sebuah proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam wilayah ekonomi itu meningkat, yang biasanya berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita, penurunan angka kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran.

Di Indonesia, pemerintah terus berusaha mengurangi angka kemiskinan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan:

1. Menyempurnakan program perlindungan sosial
2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Pembangunan yang inklusif

Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga sedang mengupayakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui berbagai program yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait antara lain seperti:

1. Kartu Indonesia Sehat (KIS)
2. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
4. Program Keluarga Harapan (PKH)
5. Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)

Agar seluruh program penanggulangan kemiskinan yang diupayakan di atas dapat berjalan efektif, pemerintah tentu harus mengawalinya dengan menargetkan program tersebut terutama kepada golongan pra-sejahtera. Menurut Silva (2008), pengetahuan yang komprehensif akan sangat dibutuhkan dalam menilai penduduk yang termasuk dalam golongan pra-sejahtera, termasuk diantaranya dengan cara mendata tempat tinggal dan profil sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, penentuan golongan pra-sejahtera secara akurat dengan menggunakan indikator kemiskinan yang baku merupakan hal yang sangat penting, untuk dijadikan sebuah variabel bagi pengambil keputusan.

Berdasarkan hal itu, penulis melihat adanya permasalahan yang berhubungan dengan penentuan keluarga pra-sejahtera di Indonesia. Dalam kenyataannya, penentuan keluarga pra-sejahtera di Indonesia belum secara komprehensif menggunakan indikator kemiskinan atau kesejahteraan yang yang dikeluarkan oleh BPS, dinas-dinas sosial, atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Obyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pagedangan

Iilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, dimana penilaian keluarga pra-sejahtera di sana ditentukan oleh para Ketua Rukun Tetangga (RT) dengan cara survei ke tempat tinggal paraarganya. Permasalahan lain yang penulis temukan adalah bahwa tidak ada satupun pendekatan yang sempurna untuk dapat dijadikan standar umum penilaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai standar nasional pun belum tentu dapat diterapkan bagi setiap wilayah ekonomi di Indonesia karena terdapatnya beragam budaya dan keadaan ekonomi rumah tangga di Indonesia (Cahyat, 2004). Pada prakteknya, indikator kemiskinan atau kesejahteraan yang ada pada umumnya hanya menekankan pada pengukuran berbagai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan.

Berdasarkan permasalahan di atas, studi ini akan melakukan kajian lebih lanjut atas berbagai indikator kemiskinan atau kesejahteraan yang baku yang dibuat oleh lembaga penelitian resmi, ditambah beberapa penelitian terdahulu, dalam rangka mendapatkan indikator yang lebih tepat dan sesuai dengan karakter Desa Pagedangan Iilir. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Perumusan Indikator Kemiskinan dan Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagedangan Iilir, Kronjo, Tangerang”**. Penelitian ini diharapkan akan dapat menghasilkan:

1. Rumusan indikator kemiskinan yang sesuai sebagai alat ukur kesejahteraan yang lebih baik bagi Desa Pagedangan Iilir.
2. Hasil pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pagedangan Iilir dari berbagai indikator kemiskinan yang telah dirumuskan.
3. Rekomendasi bagi para pembuat kebijakan di Desa Pagedangan Iilir dalam upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi dan Konsep Kemiskinan

Definisi kemiskinan terus berkembang seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator, maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak hanya dipandang dari dimensi ekonomi saja, namun meliputi dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan bahkan politik.

Gonner (2007) berpendapat bahwa kemiskinan dimaknai sebagai “kurangnya kesejahteraan” dan “kesejahteraan sebagai kurangnya kemiskinan”. Dalam hal ini, kemiskinan diartikan sebagai menurunnya tingkat kesejahteraan individu, karena keduanya saling terkait

dan memandang masalah yang sama dari dua dimensi yang berbeda. Kemudian, Sajogyo dalam Prayitno & Arsyad (1986), menyatakan bahwa kemiskinan adalah suatu tingkat kehidupan yang berada di bawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat, berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi.

Dalam perkembangannya, terdapat dua paradigma atau teori besar (*grand theory*) mengenai kemiskinan; paradigma neoliberalisme dan teori demokrasi sosial. Teori neoliberalisme yang dipaparkan Hobbes, Lock & Mill mengatakan bahwa komponen penting dalam masyarakat adalah sebuah kebebasan individu berlandaskan paham ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith dan Hayek, yang mengedepankan *azas laissez faire* dengan mekanisme pasar bebasnya. Implikasinya, kemiskinan adalah merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya apabila kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.

Teori demokrasi sosial, di lain pihak, memandang kemiskinan sebagai persoalan struktural, bukan individual masyarakat. Kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan atau ketimpangan dalam masyarakat akibat tersumbatnya akses kelompok tertentu atas sumber daya yang ada. Teori ini berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran dan ekonomi permintaan. Untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan strategi berupa pemberdayaan dana, wawasan serta keberlanjutan yang bersifat residual.

Berbagai konsep yang lebih modern dengan komparasi dari berbagai negara mencoba menerjemahkan konsep kemiskinan dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Banyak negara menerjemahkan kemiskinan hanya dari sisi pendapatan, konsumsi atau akses terhadap layanan (Haug, 2007). Bank Dunia dan UNDP (*United Nations Development Programme*) menerapkan konsep kemiskinan yang mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri, pilihan, aset, kapabilitas, inklusi sosial, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, pemukiman, kerentanan, pemberdayaan dan kesejahteraan subyektif (Locatelli, 2009; *World Bank*, 2008).

Indikator Kemiskinan dan Berbagai Alat Ukur Kesejahteraan

Agar berbagai program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif, sebuah negara perlu memiliki indikator kemiskinan yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam mengambil kebijakan. Tidak ada satupun

pendekatan yang sempurna dalam mengukur yang dapat menjadi standar umum (Cahyat, 2004). Bahkan sebuah standar nasional pun belum tentu cocok untuk diterapkan pada setiap wilayah sebuah negara karena keanekaragaman budaya dan keadaan ekonomi rumah tangga.

Beberapa institusi resmi yang mengeluarkan indikator kemiskinan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di Indonesia diantaranya adalah:

1. Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS menetapkan empat belas indikator kemiskinan, untuk mengklasifikasikan rumah tangga miskin dan menentukan rumah tangga yang berhak menerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Rumah tangga yang layak menerima PKH adalah yang memenuhi sembilan indikator kemiskinan.

2. Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sementara itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia memiliki sebelas indikator kemiskinan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

BKKBN mengelompokkan suatu keluarga ke dalam lima kriteria, yaitu keluarga pra-sejahtera (KPS), Keluarga Sejahtera I (KS-I), Keluarga Sejahtera II (KS-II), Keluarga Sejahtera III (KS-III), dan Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus). Aspek keluarga ini ditentukan berdasarkan dua puluh satu indikator yang merupakan faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga, termasuk diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan dan kebutuhan aktualisasi diri untuk berkontribusi bagi masyarakat. Bagi BKKBN, keluarga yang dikategorikan sebagai KPS dan KS-I adalah keluarga yang menjadi sasaran utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

4. Lembaga Penelitian SMERU

Pengukuran kesejahteraan yang dilakukan oleh lembaga penelitian SMERU (Akhmadi, Yursin & Yumna 2011) yang mengusulkan sistem pengumpulan data yang dikenal dengan nama *Community-Based Monitoring System (CBMS)* yang memanfaatkan daftar pertanyaan yang mudah dipahami dan melibatkan masyarakat lokal dalam pelaksanaannya. Hasil yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data ini lebih peka terhadap berbagai kondisi yang bersifat lokal.

Beberapa indikator kesejahteraan keluarga menurut lembaga ini meliputi beberapa kelompok seperti: status perkawinan, jenis kelamin kepala keluarga, tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya, pekerjaan dan sektor pekerjaan kepala keluarga, konsumsi makanan, kepemilikan harta benda, kepemilikan hewan ternak, beberapa indikator kesehatan dan kesejahteraan lainnya, serta akses terhadap lembaga keuangan.

6. *Center International for Forestry Research (CIFOR)*

CIFOR mengembangkan sistem pemantauan kemiskinan dengan pendekatan pembelajaran partisipatif. Setiap proses dalam sistem pemantauan kemiskinan ini merupakan hasil konsultasi dan kolaborasi yang ekstensif dengan pemerintah daerah setempat (Alborno, Becker, Cahyat, dkk. 2007). Aspek-aspek yang terdapat dalam model *Nested Spheres of Poverty* (NESP) dijadikan acuan untuk menyusun indikator kemiskinan.



Gambar 2.1: Model *Nested Spheres of Poverty* (NESP)
(Sumber: *Center for International Forestry Research* (2007))

Pada model NESP, beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kemiskinan dan kesejahteraan tersusun atas beberapa lingkungan. Pertama, kesejahteraan subyektif (*subjective welfare (SWB)*) yang bersifat sangat individu dan emosional. Kedua, kesejahteraan inti (*core aspects*) yang terdiri dari kebutuhan dasar yang bersifat material (kebendaan) maupun non-material, yang mencakup aspek gizi dan kesehatan, pengetahuan, dan kekayaan materi. Ketiga, lingkungan pendukung (*context aspects*) yang terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan sektoral (alam, ekonomi, ekonomi dan sosial) serta lingkungan lintas sektoral (sarana/infrastruktur dan pelayanan/program kesejahteraan).

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada indikator kemiskinan berdasarkan CIFOR atas uji cobayang mereka lakukan di Kutai Barat, Indonesia (Alborno, Becker, Cahyat, dkk.,2007).

Keterkaitan Berbagai Indikator Kemiskinan dan Pengukuran Kesejahteraan

Berbagai indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS, BKKBN, Kementerian Sosial RI dan berbagai penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU dan *Center of International Forestry Research* (CIFOR) memberikan masukan kepada peneliti dalam mengembangkan model penelitian saat ini, yang kemudian diadaptasi sesuai dengan keadaan obyek penelitian, yaitu masyarakat Desa Pagedangan Ilir. Dalam tulisan ini penelitian CIFOR yang lalu dijadikan sebagai dasar perumusan indikator kemiskinan dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Pagedangan Ilir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian *eksploratif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang penyebab atau hal-hal yang memengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga (KK) yang bermukim di Desa Pagedangan Ilir, dengan jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 100 KK. Adapun tipe pengambilan sampel yang digunakan yaitu *cluster random sampling*. Terdapat lima Rukun Warga (RW) di Desa Pagedangan Ilir, dimana dari setiap RW tersebut diambil beberapa sampel secara acak. Kemudian, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi rumah responden dan mewawancarainya, didampingi oleh Ketua RW atau RT setempat.

Uji Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua alat uji instrumen penelitian, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu uji validitas internal dan uji validitas eksternal. Uji validitas internal yaitu apabila kuesioner secara teoritis telah mencerminkan apa yang hendak diukur dan diuji dengan mengonsultasikan kuesioner kepada minimal tiga orang ahli, yang dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan luas mengenai obyek penelitian. Sementara itu, uji validitas eksternal dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali: (i) melalui analisis frekuensi jawaban yang diujicobakan kepada 30 responden untuk membuang indikator yang memiliki jawaban seragam (hampir 100 %) dan untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan dalam kuesioner sudah sesuai dengan kemampuan pemahaman responden, (ii) uji validitas terhadap 100 responden yang merupakan sampel di dalam obyek penelitian, dengan menggunakan korelasi *Pearson* yang mengkorelasikan skor item dengan skor total item. Pengujian signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika nilai positif dari r hitung $\geq r$ tabel, maka item dapat dinyatakan

valid atau agar lebih mudah, jika nilai signifikansi < 0,05 maka item valid.

Uji reliabilitas merupakan indeks atau angka yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Suatu variabel/indikator dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* >0,6, sementara jika memiliki *Cronbach Alpha* kurang dari 0,6 berarti kurang baik, sedangkan *Cronbach Alpha* 0,6-0,799 dapat diterima dan *Cronbach Alpha* 0,8-1,0 adalah baik.

Hal yang ingin diteliti oleh peneliti adalah indikator kemiskinan dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yang dianalisis secara kuantitatif. Kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran yang kompleks dan memiliki banyak pertanyaan. Item-item pertanyaan tersebut dikelompokkan dan diuji per indikator agar benar-benar yakin dapat menjelaskan indikator tersebut dengan baik.

METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

Dalam uji validitas dan uji reliabilitas tersebut, penulis memasukan angka-angka yaitu berupa skala 1-4, dimana 1 adalah sangat miskin, 2 adalah miskin, 3 adalah sejahtera dan 4 adalah sangat sejahtera, atau jika dalam kuesioner pilihan jawaban yang berada di posisi paling atas memiliki skala 1, sementara pilihan jawaban yang berada di posisi paling bawah memiliki skala 4. Hasil pengolahan dan analisis data dari uji validitas dan uji reliabilitas tersebut akan menunjukan perangkat survey kesejahteraan yang sesuai bagi Desa Pagedangan Ilir, yaitu berupa item-item pertanyaan dalam setiap indikator kemiskinan yang sudah valid dan reliabel.

Kedua, pengolahan data dengan cara menghitung indeks indikator kemiskinan/kesejahteraan, indeks dimensi kesejahteraan dan indeks kesejahteraan agregat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat desa Pagedangan Ilir. Dalam hal ini, pengolahan data masih menggunakan pendekatan secara kuantitatif, dimulai dengan memberikan skor 1-4 pada setiap pilihan jawaban pertanyaan karena terdapat empat klasifikasi kesejahteraan yang akan dibuat, yaitu sangat miskin memiliki skor 1, miskin memiliki skor 2, sejahtera memiliki skor 3 dan sangat sejahtera memiliki skor 4. Dengan kata lain, jika dalam kuesioner pilihan jawaban berada di posisi paling atas akan memiliki skor 1, sementara pilihan jawaban yang berada di posisi paling bawah akan memiliki skala 4. Dalam empat klasifikasi kesejahteraan yang telah disampaikan di atas, penulis menggunakan *metode kuartil* sebagai pedoman untuk

memberikan batas nilai yang sama banyak dalam 4 katagori yang ada. Dalam hal ini sangatlah jelas setiap klasifikasi kesejahteraan memiliki batas nilai yang sama, yaitu seperempat dari 100 atau masing-masing memiliki rentang batas nilai sebesar 25. Klasifikasi sangat miskin adalah yang memiliki batas nilai sebesar 0-25,00, klasifikasi miskin dengan batas nilai sebesar 25,01-50,00, klasifikasi sejahtera dengan batas nilai sebesar 50,01-75,00, dan klasifikasi sangat sejahtera dengan batas nilai sebesar 75,01-100.

Setelah klasifikasi tersebut, maka langkah berikutnya menghitung indeks indikator, indeks dimensi dan indeks agregat. Dalam menghitung indeks indikator, digunakan sebuah rumus dari Albornoz, Becker, Cahya, dkk. (2007) sebagai berikut.

Rumus 1. Menghitung Indeks Indikator

$$\text{Indeks Indikator} = \left(\frac{\text{Jumlah skor diperoleh} - \text{Nilai skor minimum}}{\text{Nilai skor maksimum} - \text{Nilai skor minimum}} \right) \times 100$$

Jumlah skor yang diperoleh, didapat dari total keseluruhan skor di dalam item pertanyaan tiap indikator. Jumlah skor minimum indikator didapat dari banyak item pertanyaan dalam tiap indikator, kemudian dikalikan dengan nilai skor terendah yaitu 1. Sementara itu, jumlah skor maksimum indikator didapat dari banyak item pertanyaan dalam tiap indikator, kemudian dikalikan dengan nilai skor tertinggi yaitu 4. Terdapat 11 indikator dan 41 pertanyaan yang ada di dalam kuesioner penelitian ini dengan rincian

Setelah diketahui indeks indikator, maka langkah berikutnya adalah menghitung indeks kesejahteraan dimensi dan indeks kesejahteraan agregat, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pagedangan Ilir secara keseluruhan. Indeks dimensi didapat dengan menghitung rata-rata indeks indikator yang ada pada tiap dimensi yaitu dimensi kesejahteraan subyektif yang di dalamnya mencakup indeks indikator perasaan. Kemudian dimensi kesejahteraan inti di dalam terdapat indeks indikator gizi dan kesehatan, sandang, kondisi hunian dan aset, serta tingkat pengetahuan. Kemudian, dimensi kesejahteraan lingkungan sektoral yang di dalamnya terdapat indeks indikator lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan alam, serta ketergantungan pada laut dan ladang. Dan yang terakhir adalah dimensi lingkungan lintas sektoral yang di dalamnya mencakup indeks indikator infrastruktur dan pelayanan.

Selanjutnya, indeks agregat diperoleh dengan cara menghitung rata-rata dari tiga indeks dimensi kesejahteraan, yaitu indeks dimensi kesejahteraan inti, indeks dimensi kesejahteraan lingkungan sektoral dan

indeks dimensi kesejahteraan lintas lingkungan sektoral. Sementara indeks dimensi kesejahteraan subjektif tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks kesejahteraan agregat karena sifatnya yang sangat emosional dan sangat mudah berubah yang berakibat kurang obyektif. Namun, penulis masih mempertimbangkan indeks indikator/dimensi kesejahteraan subyektif dalam penelitian ini, namun dipisahkan dalam satu indikator/dimensi kesejahteraan tersendiri, karena subyektifitas kesejahteraan, termasuk perasaan, juga terdapat dalam pengukuran tingkat kesejahteraan model NESP. Perhitungan seluruh indeks di atas, tidak hanya berguna untuk pengklasifikasian dan pengukuran kesejahteraan, tetapi juga dapat digunakan untuk memeringkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga akhirnya pengklasifikasian dan pemeringkatan kesejahteraan tersebut dapat mengetahui berbagai hal yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan di wilayah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang ada di dalam penelitian, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut;

Hasil Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan secara internal dan eksternal. Uji validitas internal dilakukan dengan mengonsultasikan kuesioner kepada tiga aparat desa Pagedangan Ilir, yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Urusan Umum di Pemerintahan Desa Pagedangan Ilir. Hasil dari uji validitas internal yang berupa kesimpulan dari tiga aparat di atas yaitu bahwa instrumen penelitian yang dibuat bisa mengukur objek penelitian secara tepat.

Selanjutnya, uji validitas eksternal dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi *Pearson* yang mengkorelasikan skor item dengan skor total item. Hasil uji validitas eksternal menunjukkan bahwa sebanyak 11 indikator dinyatakan valid..

Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas ini merupakan uji kehandalan yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach Alpha*. Hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa 11 indikator dinyatakan reliabel.

Karakteristik Responden

Pada tabel di bawah ini disajikan karakteristik data responden yang diperoleh dari pengolahan data primer penelitian ini.

Tabel 1 .Karakteristik Responden

Karakteristik Responden		Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	94	94%
	Perempuan	6	6%
	Total	100	100%
Umur	20-29 Tahun	16	16%
	30-39 Tahun	28	28%
	40-49 Tahun	31	31%
	50-59 Tahun	18	18%
	> 60 Tahun	7	7%
	Total	100	100%
Pekerjaan	Nelayan	33	33%
	Buruh Tani	15	15%
	Petani	9	9%
	Wiraswasta/Dagang	17	17%
	Karyawan Swasta	18	18%
	Asisten Rumah Tangga	1	1%
	Satpam/Security	1	1%
	Pekerja Bidang Jasa	6	6%
	Total	100	100%
Pendapatan Per Bulan	< Rp. 400.000	28	28%
	Rp.401.000-Rp.700.000	23	23%
	Rp.701.000 - Rp.1.000.000	5	5%
	Rp.1.101.000 - Rp. 1.500.000	15	15%
	Rp.1.501.000-Rp.2.000.000	6	6%
	Rp. 2.501.000-Rp.3.000.000	23	23%
	Total	100	100%
Jumlah Tanggungan	1 Orang	9	9%
	2 Orang	34	34%
	3 Orang	31	31%
	4 Orang	12	12%
	5 Orang	9	9%
	6 Orang	3	3%
	7 Orang	1	1%
	8 Orang	1	1%
	Total	100	100%

Sumber: Data diolah

Hasil Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagedangan Ilir

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pagedangan Ilir, yaitu dengan cara menghitung indeks indikator, indeks dimensi kesejahteraan dan indeks

kesejahteraan agregat. Berikut ini adalah tabel hasil pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pagedangan Ilir dari tiap indikator, dimensi dan agregat.

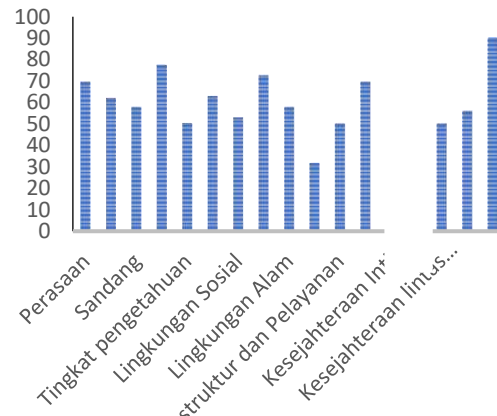
Tabel 2. Hasil Pengukuran Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Pagedangan Ilir

Indikator/dimensi/Agregat	Klasifikasi (%)			
	Sangat Miskin	Miskin	Sejahtera	Sangat Sejahtera
Indikator Perasaan Sejahtera	0%	0%	79%	21%
Dimensi Kesejahteraan Subjektif	0%	0%	79%	21%
Indikator Gizi dan Kesehatan	1%	21%	74%	4%
Indikator Sandang	0%	21%	67%	12%
Indikator Hunian dan Aset	2%	12%	22%	64%
Indikator Tingkat Pengetahuan	18%	29%	39%	14%
Dimensi Kesejahteraan Inti	1%	14%	70%	15%
Indikator Lingkungan Ekonomi	4%	16%	50%	30%
Indikator Lingkungan Sosial	3%	51%	41%	5%
Indikator Lingkungan Politik	0%	3%	47%	50%
Indikator Lingkungan Alam	0%	30%	67%	3%
Indikator Ketergantungan pada Laut dan Ladang	43%	45%	12%	0%
Dimensi Kesejahteraan Sektoral	0%	27%	72%	1%
Indikator Infrastruktur dan Pelayanan	0%	49%	51%	0%
Dimensi Kesejahteraan Lintas Sektoral	0%	49%	51%	0%
Kesejahteraan Agregat	0%	32%	67%	1%

Sumber: Data diolah 2018

Ringkasan Rata-rata Indeks dan Klasifikasi Kesejahteraan

Menurut metode klasifikasi kesejahteraan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa apabila memiliki rata-rata indeks sebesar 0-25,00, maka diklasifikasikan “Sangat Miskin”, rata-rata indeks sebesar 25,01-50,00, maka diklasifikasikan “Miskin”, rata-rata indeks sebesar 50,01-75,00, maka diklasifikasikan “Sejahtera”, dan rata-rata indeks sebesar 75,01-100, maka diklasifikasikan “Sangat Sejahtera”. Hasilnya, Desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan “Sejahtera” karena memiliki rata-rata indeks agregat 55,88 atau lebih besar 5,88 dari klasifikasi “Miskin”. Gambar di bawah ini ringkasan klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga Desa Pagedangan Ilir.



Gambar 3. Ringkasan Rata-Rata Indeks Kesejahteraan
Sumber: Data 2018, diolah

Pada gambar di atas terlihat bahwa rata-rata indeks perasaan adalah sebesar 69,56. Hal ini menandakan bahwa secara keseluruhan keluarga yang tinggal di Desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan “Sejahtera” apabila dilihat dari perasaan tinggal desa Pagedangan Ilir. Kemudian, rata-rata indeks gizi dan kesehatan sebesar 62,08. Dengan demikian, secara keseluruhan keluarga di Desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan “Sejahtera” jika dilihat berdasarkan tingkat gizi dan kesehatan. Sedangkan rata-rata indeks sandang sebesar 57,67, artinya secara keseluruhan keluarga di Desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan “Sejahtera” apabila diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan sandang. Selanjutnya, rata-rata indeks kondisi hunian dan aset sebesar 77,27, yang artinya secara keseluruhan keluarga di Desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan “Sejahtera” apabila dilihat berdasarkan keadaan tempat tinggal dan kepemilikan aset.

Rata-rata indeks tingkat pengetahuan adalah 50,44. Hal ini menandakan bahwa secara keseluruhan keluarga di Desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan “Sejahtera” berdasarkan tingkat pengetahuan dari sarana informasi yang dimiliki. Kemudian, rata-rata indeks lingkungan ekonomi adalah 62,89, yang menandakan bahwa secara keseluruhan keluarga di desa tersebut diklasifikasikan “Sejahtera” apabila dilihat berdasarkan keadaan ekonomi. Selanjutnya, rata-rata indeks lingkungan sosial adalah 52,92, yang artinya bahwa secara keseluruhan keluarga di Desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan “Sejahtera” apabila dilihat berdasarkan lingkungan sosial.

Rata-rata indeks lingkungan politik sebesar 72,56. Hal tersebut menggambarkan bahwa secara keseluruhan keluarga di Desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan “Sejahtera” apabila dilihat berdasarkan lingkungan politik. Rata-rata indeks lingkungan alam adalah sebesar 57,80, yang artinya bahwa secara keseluruhan keluarga di desa tersebut diklasifikasikan “Sejahtera” apabila dilihat berdasarkan lingkungan alam. Kemudian, rata-rata indeks

ketergantungan pada laut dan ladang adalah sebesar 31,83. Hal tersebut menggambarkan bahwa secara keseluruhan keluarga di sana diklasifikasikan "Miskin". Hal ini dapat diartikan bahwa keluarga di lingkungan tersebut masih mengandalkan dan bergantung pada laut dan ladang dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau dengan kata lain laut dan ladang merupakan sarana mata pencaharian utama mereka.

Rata-rata indeks infrastruktur dan pelayanan adalah sebesar 50,17. Hal ini menandakan bahwa secara keseluruhan keluarga di Desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan "Sejahtera" apabila dilihat berdasarkan sarana pendukung yaitu infrastruktur dan pelayanan. Kemudian, kesejahteraan subyektif memiliki indeks rata-rata yang sama dengan indeks perasaan yaitu 69,56. Selanjutnya, rata-rata indeks kesejahteraan inti adalah sebesar 61,87. Dengan demikian, bahwa secara keseluruhan keluarga di desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan "Sejahtera" apabila dilihat berdasarkan kebutuhan dasar material maupun non-material.

Rata-rata indeks kesejahteraan lingkungan sektoral adalah sebesar 55,60. Hal tersebut menggambarkan bahwa secara keseluruhan keluarga di desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan "Sejahtera" apabila dilihat berdasarkan keadaan lingkungan sektoral. Selanjutnya, kesejahteraan lingkungan lintas sektoral memiliki indeks rata-rata yang sama dengan indeks infrastruktur dan pelayanan yaitu 50,17. Terakhir, rata-rata indeks kesejahteraan agregat adalah sebesar 55,88. Hal ini menandakan bahwa secara keseluruhan keluarga di desa Pagedangan Ilir diklasifikasikan "Sejahtera" berdasarkan seluruh indikator dan dimensi pengukuran kesejahteraan yang telah dirumuskan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, terdapat sebelas indikator dan empat puluh satu item pertanyaan yang sesuai dijadikan alat ukur kesejahteraan yang baku bagi Desa Pagedangan Ilir. Kesebelas indikator tersebut terbagi ke dalam empat dimensi, yaitu (i) dimensi kesejahteraan subyektif yang hanya terdiri dari indikator perasaan yang secara keseluruhan memiliki tiga item pertanyaan, (ii) dimensi kesejahteraan inti yang terdiri dari indikator gizi dan kesehatan, sandang, kondisi hunian dan aset, serta tingkat pengetahuan. Dimensi ini secara keseluruhan memiliki lima belas item pertanyaan, (iii) dimensi kesejahteraan lingkungan sektoral termasuk diantaranya indikator lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan alam, serta indikator ketergantungan pada laut dan ladang. Dimensi kesejahteraan lingkungan

sektoral ini secara keseluruhan memiliki sembilan belas item pertanyaan. Dan (iv) dimensi kesejahteraan lingkungan lintas sektoral yang hanya terdiri dari indikator infrastruktur dan program kesejahteraan yang secara keseluruhan memiliki empat item pertanyaan.

Hasil olah data mengenai pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pagedangan Ilir menunjukkan bahwa secara agregat tidak ada keluarga di Desa Pagedangan Ilir yang diklasifikasikan "Sangat Miskin", kemudian terdapat 32% keluarga diklasifikasikan "Miskin", 67 % keluarga yang diklasifikasikan "Sejahtera", serta terdapat 1% keluarga yang diklasifikasikan "Sangat Sejahtera". Kemudian, mengenai klasifikasi tingkat kesejahteraan menurut indeks rata-rata kesejahteraan agregat, keluarga di desa Pagedangan Ilir dikategorikan "Sejahtera" dengan indeks sebesar 55,88. Meskipun demikian, tetap perlu diwaspadai karena rata-rata indeks agregat tersebut memiliki selisih hanya 5,88 dengan klasifikasi miskin dengan indeks 50,00. Oleh karena itu, Desa Pagedangan Ilir tetap perlu melakukan berbagai langkah perbaikan pada indikator-indikator yang dianggap lemah dalam rangka menekan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kemudian, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama bagi keluarga yang diklasifikasikan sangat miskin dan miskin, Desa Pagedangan Ilir dapat mengembangkan berbagai usaha dengan cara memanfaatkan potensi desa yang dimiliki, yaitu perikanan dan pertanian. Strategi yang dapat dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bermata pencaharian sebagai nelayan, buruh tani dan petani dapat dengan cara membuat fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan baik itu untuk keterampilan berwirausaha ataupun lainnya. Aparat Desa Pagedangan Ilir juga dapat mencari investor atau pihak-pihak yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat di sana untuk dapat memanfaatkan potensi desa, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan juga rumusan indikator kemiskinan yang dihasilkan dan metode pengukuran kesejahteraan dalam penelitian sebagai kontribusi bagi Pemerintahan Desa Pagedangan Ilir agar tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dan dimonitor secara lebih baik. Selain itu, Pemerintahan Desa Pagedangan Ilir dapat mengetahui hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan di Desa Pagedangan Ilir dalam upaya untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kemudian, memberikan gambaran tingkat kesejahteraan yang lebih akurat bagi lembaga-lembaga keuangan mikro di Indonesia maupun pihak-pihak yang peduli mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Pagedangan Ilir

dan dapat mempermudah proses seleksi penerima manfaat suatu program perbaikan kesejahteraan masyarakat Desa Pagedangan Ilir. Terakhir, memberikan kontribusi akademis yaitu berupa referensi untuk merumuskan indikator kemiskinan dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dan bisa dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya. *Bpk/Swd****

REFERENSI

- Akhmadi, Yusrina, A., Yumna, A. (2011). "Pelaksanaan sistem pemantauan oleh masyarakat (SPKOM) di kota Pekalongan, Indonesia". Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
<http://www.smeru.or.id/id/report-types/laporan-penelitian>
(Diakses pada 28 September 2017).
- Albornoz, M. A., Becker, M., Cahyat, A., Cronkleton, P., Jong, W.d., Evans, K., Wollenberg, E., 2007. *Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan : Buku Panduan untuk Pemerintah Daerah, Bogor: Cifor*
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.(2010). "Evaluasi pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat miskin (keluarga prasejahtera/KPS dan keluarga sejahtera-I / KS-I). Jakarta : Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, & Perlindungan Anak".
[https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/laporan-akhir evaluasi 28-jan 20110512125342 3040 1.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/2913/5022/6062/laporan-akhir%20evaluasi%2020110512125342%203040%201.pdf). (Diakses pada 25 September 2017).
- Badan Pusat Statistik RI. (2017). *Garis Kemiskinan menurut provinsi 2013-2017*.
<https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1120>. (Diakses pada 11 September 2017).
- Cahyat, A (2007). *Bagaimana kemiskinan diukur ? Beberapa model penghitungan kemiskinan di Indonesia : Bogor : Center for International Forestry Research (CIFOR)*
[https://www.cifor.org/library/1641/bagaimana-kemiskinan-diukur beberapa-mode pengukuran-kemiskinan-di-indonesia/](https://www.cifor.org/library/1641/bagaimana-kemiskinan-diukur-beberapa-mode-pengukuran-kemiskinan-di-indonesia/). (Diakses pada September 2017).
- Dinas Sosial Kota Batam .(2014). *14 Kriteria Miskin Menurut Standar BPS*.
[https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/pers aratanperizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html](https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/pers-aratanperizinan/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html)
(Diakses pada 6 Oktober 2017)
- Purwanto, Adi. (2016). *Pengertian kemiskinan menurut para ahli*.
<http://www.edugovindonesia.com/web/index.php/2-uncategorised/25-pengertian-kemiskinan-menurut-para-ahli.html> (Diakses pada 21 November 2017)
- Sekaran, U., & Bougie,R. 2010. *Research Methods for business: A skill building approach (5th ed.)*. United Kingdom : Wiley.
- Sen, Amartya. 1987. *Commodities and Capabilities*. Amsterdam: North-Holland.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2010. *Sekilas Strategi Percepatan Kemiskinan*.
<http://www.tnp2k.go.id/id/kebijakan-percepatan/strategi-percepatan-penanggulangan-kemiskinan/sekilas-strategi-percepatan/>. (Diakses pada September 2017).
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Washington, DC: World Bank.

Lampiran

Tabel 1. Indikator-indikator Kemiskinan BPS

No	Indikator
1.	Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
2.	Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3.	Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester
4.	Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain
5.	Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
6.	Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan
7.	Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8.	Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu
9.	Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10.	Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari

11.	Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12.	Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m ² , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13.	Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD
14.	Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya

Sumber: BPS, (2014)

Tabel 2. Indikator-indikator Kemiskinan Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia

No	Indikator
1.	Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
2.	Mempunyai pengeluaran sebagian besar untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana
3.	Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah
4.	Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga
5.	Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
6.	Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester
7.	Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
8.	Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah
9.	Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
10.	Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m ² /orang
11.	Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya

Sumber: Kemiskinan Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia (2013)

Tabel 3. Indikator-indikator Tahapan Keluarga Sejahtera BKKBN

No	Indikator	Klasifikasi	Kriteria Keluarga Sejahtera
----	-----------	-------------	-----------------------------

1.	Makan dua kali atau lebih	Kebutuhan dasar (<i>basic need</i>)	<u>Keluarga Sejahtera I</u> Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS-I maka termasuk ke dalam keluarga Pra-Sejahtera
2.	Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di rumah, bekerja, sekolah dan bepergian)		
3.	Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang kokoh		
4.	Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan		
5.	Pasangan Usia Subur (PUS) ingin ber-KB ke sarana kontrasepsi		
6.	Semua anak 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah		
7.	Melakukan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing	Kebutuhan psikologi (<i>psychological needs</i>)	<u>Keluarga Sejahtera II</u> Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 8 indikator KS-II maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera I
8.	Paling kurang sekali seminggu makan daging/ikan/telur		
9.	Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun		
10.	Luas lantai rumah kurang lebih 8 m ² untuk setiap penghuni rumah		
11.	Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat		
12.			
13.			

	Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin Pasangan Usia Subur (PUS) dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.		
15.	Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama	Kebutuhan pengembangan (<i>Development needs</i>)	<u>Keluarga Sejahtera III</u> Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 5 indikator KS-III maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera II
16.	Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang		
17.	Makan sekali bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi		
18.	Mengikuti kegiatan masyarakat	Kebutuhan aktualisasi diri (<i>Self esteem needs</i>)	<u>Keluarga Sejahtera III Plus</u> Jika tidak dapat memenuhi satu atau lebih dari 2 indikator KS-III Plus maka termasuk ke dalam Keluarga Sejahtera III
19.	Memperoleh informasi dari surat kabar, majalah, radio TV		
20.	Memberikan sumbangan materiil secara teratur		
21.	Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan		

Sumber: BKKBN dalam Bappenas (2010)

Tabel 4. Indikator-indikator Kesejahteraan Keluarga Menurut Lembaga Penelitian SMERU

No	Kelompok Indikator	Indikator
1.	Status perkawinan	Kepala keluarga berstatus menikah
2.	Jenis kelamin kepala keluarga	Kepala keluarga laki-laki Kepala keluarga perempuan
3.	Tingkat pendidikan kepala keluarga dan pasangannya	Pendidikan kepala keluarga tidak bersekolah Pendidikan kepala keluarga SD Pendidikan kepala keluarga SLTP Pendidikan kepala keluarga SLTA Pendidikan kepala keluarga Diploma Pendidikan kepala keluarga Sarjana Pendidikan pasangan tidak bersekolah Pendidikan pasangan SD Pendidikan pasangan SLTP Pendidikan pasangan SLTA Pendidikan pasangan Diploma Pendidikan pasangan Sarjana
4.	Sektor pekerjaan kepala keluarga	Kepala keluarga di sektor pertanian Kepala keluarga di sektor industri Kepala keluarga di sektor perdagangan Kepala keluarga di sektor jasa Kepala keluarga menerima transfer (Pensiunan) Kepala keluarga di sektor lain
5.	Pekerjaan	Kepala keluarga bekerja Pasangan bekerja Sedikitnya ada 1 anggota keluarga yang berusia 6-25 tahun bekerja
6.	Konsumsi Makanan	Makan tiga kali sehari Makan telur setidaknya sekali dalam seminggu Makan ikan setidaknya sekali dalam seminggu

		Makan daging setidaknya sekali dalam seminggu Minum susu setidaknya sekali dalam seminggu
7.	Kepemilikan harta benda	Memiliki radio Memiliki TV hitam putih Memiliki TV berwarna Memiliki lemari es Memiliki sambungan telepon permanen Memiliki telepon genggam Memiliki kompor gas Memiliki pemutar DVD Memiliki kipas angin Memiliki komputer Memiliki <i>tape recorder</i> Memiliki AC Memiliki sepeda Memiliki sepeda motor Memiliki mobil Memiliki perahu Memiliki perahu motor Memiliki rumah
8.	Kepemilikan hewan ternak	Memiliki sapi Memiliki kambing Memiliki ayam atau bebek
9.	Indikator kesehatan	Menggunakan WC pribadi Tinggal di rumah berlantai tanah Minum air dari sumber yang terlindung Mencari perawatan medis modern saat sakit Mengalami kematian bayi dalam tiga tahun terakhir
10.	Indikator kesejahteraan lain	Menggunakan sumber penerangan listrik Mayoritas keluarga membeli baju baru dalam setahun terakhir Membaca koran atau majalah Menjadi korban kejahatan pada tahun lalu Aktif di organisasi lingkungan rumah Setidaknya ada 1 anggota keluarga yang berusia 6-15 tahun yang putus sekolah Rasio ketergantungan yang tinggi (lebih dari separuh anggota keluarga di bawah usia 15 tahun)
11.	Akses ke lembaga keuangan	Memiliki tabungan Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan formal Memiliki utang/pinjaman pada lembaga keuangan informal Harus menjual harta benda untuk melunasi hutang

Sumber: Akhmadi, Yusrina & Yumna (2011)

Tabel 5. Indikator Kesejahteraan CIFOR

No	Kelompok Indikator	Indikator
1.	Data dasar rumah tangga	Jumlah anggota rumah tangga Jumlah keluarga dalam rumah tangga Jumlah laki-laki dewasa dalam rumah tangga Jumlah perempuan dewasa dalam rumah tangga Jumlah anak perempuan Suku mayoritas Yatim piatu, janda, atau orang/anak cacat
2.	Kesejahteraan subjektif	Perasaan sejahtera Perasaan miskin Perasaan bahagia
3.	Kesejahteraan inti: > Kesehatan dan gizi	Kekurangan makanan Akses kepada air minum bersih Akses kepada pelayanan kesehatan
4.	> Kekayaan materi	Kondisi rumah Memiliki sepeda motor

		Memiliki antena parabola atau kulkas
5.	> Pengetahuan	Tingkat pendidikan (formal) orang dewasa Jumlah anak yang sekolah atau putus sekolah Pengetahuan informal
6.	Lingkungan pendukung >Lingkungan alam	Frekuensi kunjungan ke hutan atau danau Tingkat kerusakan lingkungan alam Keberadaan burung enggang atau bangau tongtong Pengambilan sumber daya alam secara berlebihan Mutu air
7.	> Lingkungan ekonomi	Sumber penghasilan Persediaan beras dan kemampuan membeli beras Akses pada kredit
8.	> Lingkungan social	Tingkat tolong menolong Tingkat rasa saling percaya Konflik
9.	> Lingkungan politik	Akses kepada sumber daya alam Akses kepada informasi Keikutsertaan dalam pengambilan keputusan di desa
10.	Ketergantungan pada hutan	Berladang dan hasil panen Umur lahan untuk ladang Tingkat kepentingan hasil hutan bukan kayu Tingkat kepentingan hewan buruan
11.	Infrastruktur dan pelayanan/program kesejahteraan	Fasilitas pendidikan desa Kualitas pendidikan di sekolah Distribusi beasiswa Fasilitas pelayanan kesehatan Kualitas pelayanan kesehatan Distribusi kartu AKSES GAKIN (KIN) Distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Distribusi beras untuk masyarakat miskin (Raskin) Pelatihan dan pendampingan usaha Kondisi jalan dan jembatan Fasilitas pasar Bantuan untuk rumah tidak layak huni Persepsi terhadap program pemerintah Persepsi terhadap program non-pemerintah Fasilitas Komunikasi Pelayanan rohani Fasilitas rekreasi Pengetahuan tentang Gerakan Sendawar Makanan (GSM)

Sumber: Alborno, Becker, Cahyat, dkk. (2007)

Tabel 6. Rincian Nilai Skor Minimum dan Nilai Skor Maksimum dari Tiap Indikator

No	Indikator dan Pertanyaan	Nilai Skor Minimum	Nilai Skor Maksimum
1.	Perasaan (Kesejahteraan Subjektif) Sejahtera Bahagia Dihargai	3	12
2.	Gizi dan Kesehatan Konsumsi nasi Konsumsi daging Akses kesehatan Sumber air minum	4	16

No	Indikator dan Pertanyaan	Nilai Skor Minimum	Nilai Skor Maksimum
3.	Sandang Frekuensi membeli pakaian Tempat membeli pakaian Pakaian berbeda untuk aktivitas berbeda	3	12
4.	Kondisi Hunian dan Aset Lantai Dinding Listrik MCK Tabungan atau aset barang berharga	5	20
5.	Tingkat Pengetahuan Akses TV Akses Internet Akses Surat Kabar	3	12
6.	Lingkungan Ekonomi Penghasilan Kredit barang/berhutang Gadai Barang	3	12
7.	Lingkungan Sosial Tolong menolong Tingkat saling percaya Tingkat keamanan Tingkat toleransi	4	16
8.	Lingkungan Politik Kinerja aparat desa Musyawarah Partisipasi terhadap acara di desa	3	12
9.	Lingkungan Alam Keadaan got/selokan Kualitas air Tingkat kebisingan Tingkat polusi udara Kebersihan sampah	5	20
10.	Ketergantungan pada Laut dan Ladang (Sawah) Ketergantungan pada laut Ketergantungan pada ladang Kepentingan hasil laut Kepentingan hasil ladang	4	16
11.	Infrastruktur dan Program Kesejahteraan Jalan desa Fasilitas hiburan Fasilitas pelatihan Program kesejahteraan	4	16

Sumber: Data diolah

